KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Indikasi kenaikan harga BBM menguat
Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 11

KSSK Waspadai Ketidakpastian Global

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 ditargetkan berada dalam rentang 4,7–5,5 persen. Adapun laju inflasi diproyeksikan berkisar 2–4 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Stabilitas sistem keuangan nasional di sepanjang tiga bulan pertama tahun 2022 masih terjaga. Meski begitu, otoritas tetap mewaspadai berbagai risiko rambatan kondisi global yang berpotensi memengaruhi sisi inflasi, nilai tukar, dan kinerja perekonomian secara keseluruhan.

Dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (13/4/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, stabilitas sistem keuangan Indonesia dalam kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang meningkat akibat operasi militer Rusia di Ukraina.

"Perang memicu kenaikan harga komoditas global secara signifikan pada komoditas pangan, energi, dan logam sehingga berdampak pada inflasi global. Situasi ini menciptakan tantangan bagi normalisasi moneter di negara maju dan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global," ujarnya.

Terjaganya stabilitas sistem keuangan nasional di triwulan I-2022 terlihat dari surplus neraca perdagangan pada Februari 2022 yang meningkat hingga 3,83 miliar dollar AS. Surplus ini didukung surplus neraca perdagangan non-migas, terutama meningkatnya harga komoditas global seperti batubara, bahan baku minyak goreng (CPO), besi, dan baja.

Sementara itu, hingga Maret 2022, cadangan devisa berada pada tingkat tinggi mencapai 139,1 miliar dollar AS. Nilai ini setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah.

Dari sisi stabilitas nilai tukar, meski pada triwulan I-2022 rata-rata nilai tukar rupiah terdepresiasi 0,33 persen dari posisi triwulan IV-2020, besaran depresiasi masih lebih rendah dibandingkan mata uang sejumlah negara berkembang lain, seperti ringgit Malaysia (1,15 persen), India (1,72 persen), dan Thailand (3,15 persen).

"Stabilitas nilai tukar rupiah terjaga oleh kinerja ekspor yang mengalami peningkatan signifikan. Namun, perkembangan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global yang terancam oleh perang Rusia dan Ukraina tetap perlu diwaspadai," kata Sri Mulyani.

Tren Industri Jasa Keuangan

A. Intermediasi perbankan per Februari 2022 melanjutkan tren peningkatan dengan **pertumbuhan kredit 6,33 persen (tahunan),** terutama ditopang kredit UMKM-ritel dan korporasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar **8,75 persen dan 5,83 persen.**

B. Dana pihak ketiga (DPK) meneruskan pertumbuhan dua digit sebesar 11,11 persen yang utamanya didukung kenaikan giro sebesar Rp 30,1 triliun.

C. Dari industri keuangan nonbank (IKNB), penyaluran pembiayaan meningkat ke level Rp 372 triliun dan tumbuh positif sebesar 2,43 persen (tahunan) didorong oleh jenis pembiayaan modal kerja dan investasi dengan mayoritas sektoral mengalami pertumbuhan positif.

D. Industri perasuransian berhasil menghimpun **premi pada Februari 2022 sebesar Rp 18,0 triliun dengan premi asuransi jiwa sebesar Rp 11,9 triliun dan asuransi umum Rp 6,1 triliun.**

E. Penghimpunan dana di pasar modal hingga akhir 5 April 2022 telah mencapai Rp 63,93 triliun dengan penambahan emiten baru sebanyak 17 emiten. Perkembangan pasar modal cukup positif di tengah dinamisme risk sentimen global, ditunjukkan dengan IHSG yang mencatatkan rekor all time high di level 7.210,84 pada 8 April 2022 dan menguat sebesar 9,56 persen (sejak awal tahun).

Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah dari paparan 13 April 2022)

KOMPAS/IKHSAN MOH

Ia menegaskan, meningkatnya ketidakpastian kondisi global berpotensi memengaruhi inflasi dan kinerja perekonomian dalam negeri. KSSK akan terus memperkuat koordinasi pemantauan bersama dan bersinergi merumuskan respons kebijakan dalam menjaga ritme pemulihan ekonomi nasional.

Antisipasi

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan, pihaknya akan berupaya mengantisipasi potensi kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), sebanyak tujuh kali pada tahun ini.

Langkah itu direncanakan The Fed untuk merespons inflasi AS yang melonjak tinggi, bahkan mencapai 8,5 persen secara tahunan (*year on year*) pada Maret 2022.

"Terus meningkatnya imbal hasil US Treasury tentu akan berimplikasi pada penyesuaian imbal hasil surat berharga negara (SBN)," katanya.

BI bersama Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan berbagai langkah dan akan terus berupaya mengantisipasi dampak dari kenaikan suku bunga The Fed sehingga stabilitas sistem keuangan di dalam negeri tetap terjaga.

Meski demikian, Perry belum dapat memastikan apakah suku bunga acuan BI akan dinaikkan seiring dengan naiknya suku bunga The Fed dan meningkatnya inflasi di dalam negeri. Ia hanya mengatakan, kenaikan suku bunga acuan BI hanya akan dilakukan ketika inflasi telah memberikan dampak rambatan secara fundamental.

Saat ini suku bunga acuan BI sebesar 3,5 persen, yang merupakan level terendah sepanjang sejarah.

Pada tahun ini, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada dalam kisaran 4,7-5,5 persen. Adapun laju inflasi akan terkendali dalam sasaran 2-4 persen.

Intermediasi bank

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kredit perbankan tumbuh 6,33 persen pada Februari 2022 jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.

Perkembangan ini ditopang oleh kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan korporasi yang masing-masing tumbuh 8,75 persen dan 5,83 persen.

"Dengan demikian, intermediasi perbankan per Februari 2022 melanjutkan tren peningkatan. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) terus melanjutkan pertumbuhan mencapai 11,11 persen secara tahunan," ujarnya.

Ia menegaskan, OJK akan terus mengamati dampak perang Rusia-Ukraina, percepatan normalisasi kebijakan moneter negara maju, serta kenaikan inflasi global terhadap kondisi perekonomian dan stabilitas sektor jasa keuangan di dalam negeri.

OJK juga terus bersinergi bersama KSSK dalam memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional, termasuk ekonomi hijau.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, lembaganya akan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui sejumlah program penjaminan simpanan dan resolusi bank yang kredibel.

LPS juga berupaya mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) di level yang rendah.

TBP rupiah di bank umum dan BPR untuk periode berlaku 29 Januari 2022-27 Mei 2022 masing-masing sebesar 3,5 persen dan 6 persen. Sementara itu, TBP valas untuk bank umum dipertahankan sebesar 0,25 persen.

"Kebijakan ini berkontribusi dalam memberikan ruang untuk menjaga biaya dana perbankan tetap rendah sehingga diharapkan dapat mendorong kredit dengan bunga yang terjangkau," kata Purbaya. (DIM)

Indikasi Kenaikan

(Sambungan dari halaman 1)

(CP Aramco) untuk elpiji 839,6 dollar AS per ton atau melonjak dari awal tahun yang berkisar 569 dollar AS per ton.

"Untuk jangka menengah, strategi kami adalah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak jenis pertalite, solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti. Misalnya, bahan bakar gas atau bioetanol. Penyesuaian harga BBM subsidi akan mengikuti harga keekonomiannya," kata Arifin.

Untuk bahan bakar gas, ujar Arifin, salah satu strategi jangka menengah pemerintah adalah menaikkan harga jual eceran. Ia meyakini cara itu mampu mengurangi tekanan terhadap APBN. Strategi tersebut juga akan diikuti dengan skema subsidi elpiji langsung kepada pengguna yang berhak disubsidi.

Selain BBM dan elpiji, menurut Arifin, pemerintah juga berencana menaikkan tarif listrik sebagai strategi jangka pendek untuk merespons dampak kenaikan harga minyak dunia. Ia memastikan, rencana tersebut dilakukan tahun ini. Potensi penghematan kompensasi jika tarif listrik dinaikkan sebesar Rp 7 triliun-Rp 16 triliun.

Menanggapi rencana itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno berpendapat, pemerintah perlu mendetailkan rencana kenaikan harga pertalite, solar, elpiji, dan tarif listrik beserta waktu realisasinya. Detail seperti itu penting karena berkaitan dengan dampak yang bakal dirasakan masyarakat dan sektor industri.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, saat membacakan kesimpulan rapat kerja, mengatakan, penting bagi pemerintah menjelaskan kepada masyarakat terkait dinamika kenaikan harga minyak mentah dunia dan dampaknya ke harga BBM eceran dalam negeri. Hal penting berikutnya adalah pemerintah harus meningkatkan pengawasan distribusi BBM dan menindak badan usaha/perseorangan yang terbukti menimbun atau membeli BBM subsidi yang bukan hak mereka.

Waktu harus tepat

Secara terpisah, Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Kantor Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani mengatakan, kenaikan harga minyak mentah dunia di luar kendali Indonesia. Semua negara mengalami hal yang sama.

"Kemampuan keuangan pemerintah terbatas. Situasi pemerintah sudah sulit jika subsidi energi terus ditambah. Sementara di sisi lain pemerintah masih harus memberikan stimulus penanganan Covid-19. Keuangan badan usaha milik negara (BUMN), seperti Pertamina, juga sudah tertekan," ujar Dendi.

Oleh karena itu, menurut Dendi, menaikkan harga jual energi tidak terelakkan. Hanya saja, pemerintah harus cermat menentukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga. Jika kenaikan tersebut dilakukan saat Ramadhan, ini bukan langkah bijak. Dia menyarankan realisasi dilakukan setelah Idul Fitri 2022.

Dendi juga memberikan perhitungan, jika harga elpiji 3 kilogram dinaikkan 10 persen, pertambahan inflasi 0,35 persen. Apabila harga pertamax naik 39 persen, inflasi naik 0,20 persen. "Pemerintah tetap harus menggendalikan inflasi dari sumber lain dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. Subsidi energi kepada mereka tetap harus ada, seperti tarif listrik untuk mereka tidak dinaikkan," tuturnya.

Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov menambahkan, rencana pemerintah menaikkan harga energi tidak hanya akan menciptakan inflasi di tingkat konsumsi, tetapi juga di tingkat produksi. Apalagi, salah satu sasaran pemerintah adalah menaikkan harga BBM jenis solar yang selama ini jadi *input* produksi.

"Situasi seperti itu berpotensi menciptakan pemutusan hubungan kerja. Pada akhirnya, laju pemulihan ekonomi tidak berjalan. Walaupun, argumentasi pemerintah (menaikkan harga energi) kuat, seperti menjaga APBN dan keuangan BUMN energi, kami memandang pemerintah seharusnya fokus ke distribusi energi yang tepat sasaran," cetap Abra.

Mengutip Bloomberg, pada Rabu sore, harga minyak mentah jenis Brent ada di level 106 dollar AS per barel, sedangkan harga gas alam di level 6,79 dollar AS per juta british thermal unit (MMBTU). Harga tersebut melesat jauh dibandingkan awal pandemi pada Maret 2020 di mana harga minyak mentah jenis Brent di kisaran 30 dollar AS per barel dan harga gas alam 2 dollar AS per MMBTU.

Lonjakan harga ini, selain disebabkan tingginya permintaan akibat pulihnya ekonomi sejumlah negara dari pandemi, juga dipicu konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Rusia adalah pemasok sekitar 10 persen minyak mentah dunia dan produsen utama gas di Eropa.

Dampak kenaikan harga komoditas energi tersebut di Indonesia, per 1 April 2022, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga pertamax dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter. Selain BBM, harga elpiji nonsubsidi 12 kg juga naik dari semula Rp 162.000 per tabung menjadi Rp 182.000 per tabung. Kenaikan harga tersebut berlaku mulai Minggu (27/2).

Kementerian Keuangan mencatat, besaran subsidi energi pada Januari 2022 Rp 10,2 triliun. Angka itu melonjak lebih dari empat kali lipat dibandingkan Januari 2021 yang sebesar Rp 2,3 triliun. Lonjakan ini berpotensi membebani APBN di tengah keterbatasan kapasitas fiskal. (MED/APO)